

DETERMINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Khairudin^{1*}, Aminah²

^{1,2}Universitas Bandar Lampung
khairudin@ubl.ac.id^{1*)}, aminah@ubl.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 16 Januari
2022
Received in Revised 15
Februari 2022
Accepted 18 April
2022

Keyword's :
government size,
fiskal decentralization,
welfare

ABSTRACT

Welfare for the people will soon be realized if it is supported by sufficient resources and good management. The purpose of this research is to examine the effect of government size and fiskal decentralization on the welfare of all provincial governments in Indonesia for the 2014-2018 period. Welfare is measured by HDI; the size of the local government is measured using the total revenue earned in a year; and fiskal decentralization is measured through profit sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds obtained in a year. The test was conducted through panel data regression with the findings that the size of the government and fiskal decentralization had a positive and significant effect on welfare. This finding is show of the importance of the sustainability of stakeholder theory and the joint commitment of all parties to maximize the performance of local governments in terms of local revenue and decentralization funds to speed up the realization of welfare for the community

Kesejahteraan bagi rakyat akan segera dapat terwujud jika didukung oleh sumber daya yang cukup dan pengelolaan yang baik. Tujuan dari riset ini menguji pengaruh ukuran pemerintah dan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia periode 2014-2018. Kesejahteraan diukur dengan IPM; ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan total pendapatan yang diperoleh dalam setahun; dan desentralisasi fiskal diukur melalui dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang diperoleh dalam setahun. Pengujian dilakukan melalui regresi data panel dengan hasil temuan bahwa ukuran pemerintah dan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Temuan ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan teori *stakeholder* dan komitmen bersama semua pihak untuk memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam hal penerimaan pendapatan daerah dan dana desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author.

E-mail address: khairudin@ubl.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Seiring dengan terbitnya UU No. 23/2014 sebagai revisi atas UU No. 32/2004, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus daerahnya dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan di Indonesia. Untuk itu kesejahteraan bagi masyarakat wajib untuk segera diwujudkan oleh pemerintah, karena merupakan amanat dari UU No.23/2014. Selain itu, kesejahteraan juga merupakan cerminan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik (Cheung, 2013). Namun, sampai dengan saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di tingkat internasional berada diposisi 111 dibawah negara-negara ASEAN seperti: Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia dan Singapura (UNDP, 2019). Hal ini diperkuat oleh BPS-RI yang menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2018 masih terdapat 62,65% pemerintah daerah di Indonesia yang tingkat kesejahteraannya berada pada kategori “sedang dan rendah” (BPS-RI, 2019).

Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat akan terwujud jika pemerintah memiliki kinerja keuangan yang baik, yang tercermin dari baiknya pengelolaan APBN/APBD. Karena menurut UU No.23/2014, kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan harus didukung oleh keuangan/pendanaan yang cukup yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah ukuran pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan (Dalimunthe *et al.*, 2015; Manik, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan. Pemerintah daerah yang besar tentunya memiliki sumber daya yang sangat cukup. Sumber daya yang besar mempermudah pemerintah menentukan berbagai alternatif program pembangunan secara leluasa, sehingga pemerintah dapat meningkatkan pendapatan serta meningkatkan pelayanan guna mensejahterakan masyarakat.

Penelitian tentang ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal dan kesejahteraan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang masih bertentangan. Penelitian Manik, (2013) menyatakan bahwa peningkatan ukuran pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Dalimunthe *et al.*, (2015) menemukan ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif pada indeks pembangunan manusia di Indonesia. Temuan berbeda diungkapkan Fölster & Henrekson (2006) yang berkesimpulan bahwa untuk negara maju terdapat korelasi negatif antara ukuran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, (Habibi *et al.*, 2003) menemukan dampak positif desentralisasi fiskal terhadap kesehatan dan pendidikan di Argentina. (Mehmood & Sadiq, 2010) berkesimpulan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pembangunan manusia dan juga memperkuat federasi di Pakistan. Namun, (Woller & Phillips, 1998) memberikan temuan yang berbeda bahwa hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan. (Zhang & Zou, 2001) juga menyatakan bahwa

terdapat hubungan negatif desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi regional di China. Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mempertegas hasil penelitian terdahulu yang masih tidak konsisten dan juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui manajemen pengelolaan dana desentralisasi dan sumber daya lainnya yang dimiliki pemerintah. Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ukuran pemerintah dan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada riset ini berupa pendekatan kuantitatif melalui regresi data panel.

Temuan ini diharapkan memberikan tambahan referensi tentang pengaruh ukuran pemerintah dan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan serta diharapkan memberikan kontribusi bagi para *stakeholder* untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dana desentralisasi dan sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2014-2018. Pemilihan pemerintah provinsi sebagai objek penelitian dikarenakan menurut UU No. 33/2014 pemerintah provinsi juga mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat secara berkala untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria (1) pemerintah provinsi yang memiliki data IPM yang bersumber dari BPS-RI, (2) pemerintah provinsi yang memiliki data total pendapatan daerah serta data dana perimbangan yang bersumber dari BPK-RI periode 2014-2018. Kesejahteraan diukur dengan indeks pembangunan manusia (Dalimunthe *et al.*, 2015; Hajibabaei & Ahmadi, 2014; Jumadi *et al.*, 2013; Soejoto & Subroto, 2015). Ukuran pemerintah daerah diukur dengan total pendapatan yang diperoleh dalam setahun (Masdiantini & Erawati, 2016; Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Desentralisasi fiskal diukur melalui dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang diperoleh dalam setahun (Jumadi *et al.*, 2013; Soejoto & Subroto, 2015). Pengujian dilakukan dengan regresi data panel, dimana sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Adapun model regresinya adalah:

$$W_{it} = \alpha + \beta_1 GS_{it} + \beta_2 DF_{it} + \epsilon_{it} \quad \dots(1)$$

Dimana W_{it} adalah *welfare* atau kesejahteraan selama periode pengamatan yang diukur dengan IPM; GS_{it} adalah *government size* yang diukur dengan total pendapatan daerah selama periode pengamatan; DF_{it} adalah *fiskal decentralization* atau desentralisasi fiskal yang diukur dengan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus selama periode pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian statistik deskriptif, tentang ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 1: Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Mak	Mean	SD
Gov Size	170	1.21	64.82	8.29	10.34
FD	170	0.80	18.97	3.20	3.12
Walfare	170	56.75	80.47	9.17	4.14
Valid N (listwise)	170				

Sumber : Data Diolah, 2019

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan total pendapatan provinsi terendah dimiliki oleh Provinsi Gorontalo sebesar Rp 1.21 triliun (yang terjadi pada tahun 2014), total pendapatan provinsi tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 64.82 triliun (yang terjadi pada tahun 2017), nilai rata-rata total pendapatan pemerintah provinsi di Indonesia sebesar Rp 8.29 triliun dan secara rata-rata selama periode pengamatan ukuran pemerintah terbesar berdasarkan total pendapatan adalah DKI Jakarta sebesar Rp 53.57 triliun, Jawa Barat sebesar Rp 28.01 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp 25.95 triliun. Desentralisasi fiskal terendah diterima oleh Provinsi Gorontalo sebesar Rp 0.80 triliun (yang terjadi pada tahun 2014), desentralisasi fiskal tertinggi diterima oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 18.97 triliun, nilai rata-rata desentralisasi fiskal yang diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia sebesar Rp 3.20 triliun dan secara rata-rata selama periode pengamatan desentralisasi fiskal terbesar diterima oleh DKI Jakarta sebesar Rp 13.53 triliun, Jawa Barat sebesar Rp 8.87 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp 8.28 triliun. Jika dihubungkan dengan total pendapatan pemerintah daerah selama periode pengamatan, maka hampir seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sumber pendapatan terbesar adalah penerimaan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat sebesar diatas 25% (kecuali Provinsi Nangro Aceh Darussalam hanya sebesar 20.53%). Hal ini menggambarkan bahwa secara umum pemerintah provinsi di Indonesia sebagian besar sumber pendapatannya merupakan transfer dari pemerintah pusat, sehingga akan berdampak pada rendahnya kemandirian keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya akan mengganggu percepatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada masing-masing daerah. Kesejahteraan tertinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,47 yang terjadi pada tahun 2018, IPM terendah ada pada Provinsi Papua sebesar 56,75, nilai rata-rata IPM pada pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 69,17 (termasuk dalam kriteria penilaian “sedang”). Secara rata-rata selama periode pengamatan provinsi yang memiliki IPM tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai 79.50 dan DI Yogyakarta dengan nilai 78.24. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Khairudin *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat pada 146 pemerintah kabupaten/kota di Wilayah Sumatera termasuk kategori “sedang”.

Penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik. Selain itu, penelitian ini juga telah melakukan pengujian estimasi model regresi dan menghasilkan model *fixed effect* sebagai model regresi data panel yang paling cocok untuk digunakan, sehingga hasil pengujian statistik seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2: Hasil Statistik Model Regresi Dengan *Fixed Effect*

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	69.6280	58.0628	0.0000
GS	0.0497	3.5066	0.0006
FD	1.2098	4.2466	0.0000
Adj R-squared	0.4597		
Prob F-statistic	0.0000		

Sumber: Data Diolah, 2019

Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif pada Kesejahteraan

Ukuran pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis, karena pemerintah yang besar tentunya akan memiliki potensi sumber daya yang melimpah, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan. Hasil pengujian hipotesis menginformasikan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Ini menunjukkan ukuran pemerintah yang semakin besar akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini, dikarenakan sumber daya yang mencukupi mempermudah organisasi menentukan berbagai alternatif program pembangunan secara leluasa, sehingga setiap program atau rencana kerja untuk pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat dipenuhi karena pemerintah memiliki anggaran yang cukup dan tidak mengandalkan sumber pendapatan eksternal. Selain itu, dengan sumber daya yang besar dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, sehingga mempercepat proses pembangunan dan juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan.

Hasil temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian (Dalimunthe *et al.*, 2015; Lindaman & Thurmaier, 2002; Manik, 2013) yang menemukan ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, temuan ini mendukung keputusan pemerintah yang menghentikan sementara waktu usulan pemekaran daerah baru di Indonesia yang masih banyak meninggalkan konflik politik dan sosial di daerah.

Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Positif pada Kesejahteraan

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk dapat secara mandiri mengelola pemerintahan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Strategi ini dilakukan agar kesejahteraan masyarakat dapat segera terealisasi, mengingat pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspirasi masyarakatnya. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, pemerintah pusat menyerahkan sumber-sumber

pendanaan melalui transfer dana kepada pemerintah daerah yang disebut sebagai dana perimbangan. Hasil pengujian hipotesis menginformasikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Ini menunjukkan keberadaan dan peningkatan desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan fiskal kepada daerah yang dianggap lebih memahami aspirasi masyarakatnya, sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan merupakan keinginan murni dari masyarakat.

Temuan ini telah menguatkan hasil penelitian (Jumadi *et al.*, 2013; Mehmood & Sadiq, 2010; Soejoto & Subroto, 2015) yang menemukan dampak positif desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan. Selain itu, temuan penelitian ini mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk terus meningkatkan alokasi dana desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini berkesimpulan (1) ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan ukuran pemerintah sangat penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, mengingat ukuran pemerintah yang besar tentunya berpotensi menghasilkan sumber daya yang memudahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, sehingga mempercepat proses pembangunan dan juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan. (2) desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Ini menunjukkan keberadaan dan peningkatan alokasi dana desentralisasi bagi pemerintah daerah sangat penting guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena dana desentralisasi diperuntukkan guna mendukung pemerintah daerah mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan terbaik bagi masyarakat.

Implikasi temuan ini secara teoritis mendukung keberadaan teori *stakeholder*, dimana sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah akan memaksimalkan kebermanfaatannya berupa kesejahteraan bagi seluruh *stakeholder* melalui strategi pendapatan daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu, implikasi lain dari penelitian ini berupa komitmen bersama semua pihak untuk memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam hal penerimaan pendapatan daerah dan dana desentralisasi.

Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan periode pengamatan, melakukan penelitian pada pemerintah kabupaten/kota dan menambahkan variabel lainnya seperti *good governance*, mengingat sumber daya yang besar harus didukung oleh tatakelola yang baik, sehingga

sumber dana yang besar dapat terhindar dari praktek korupsi dan benar-benar dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS-RI. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. BPS-RI. <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>
- Cheung, C. (2013). Postmaterialist Influences on Welfare Adequacy and Political Trust in Hong Kong. *The Journal of Comparative Asian Development*, 12(1), 147–179. <https://doi.org/10.1080/15339114.2013.781423>
- Dalimunthe, D. M. J., Fadli, F., & Muda, I. (2015). A Study on The Impact of Government Complexity and Regional Government's Size on Human Development Index in North Sumatera, Indonesia. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 3(1), 1–19.
- Fölster, S., & Henrekson, M. (2006). Growth effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries: A Reply. *European Economic Review*, 50(1), 219–221. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.02.007>
- Habibi, N., Huang, C., Miranda, D., Murillo, V., Ranis, G., Sarkar, M., & Stewart, F. (2003). Decentralization and Human Development in Argentina. *Journal of Human Development*, 4(1), 73–101. <https://doi.org/10.1080/1464988032000051496>
- Hajibabaei, H., & Ahmadi, A. (2014). Government Size and Human Development: Quadratic Regression Approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 4(4), 160–166. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v4-i4/773>
- Jumadi, J., Pudjiharjo, M., Maski, G., & Khusaini, M. (2013). The Impact of Fiskal Decentralization on Local Economic Development in East Java. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 13(1), 01–07. <https://doi.org/10.9790/0837-1310107>
- Khairudin, K., Tarmizi, R., Indrayenti, I., Aminah, A., & Muhammad, K. (2018). Financial Performance of Local Government and Social Welfare: The Case in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research, Special Issue*, 1035–1039:5. <https://ideas.repec.org/a/arp/tjsrr/2018p1035-1039.html>
- Lindaman, K., & Thurmaier, K. (2002). Beyond Efficiency and Economy: An Examination of Basic Needs and Fiskal Decentralization. *Economic Development and Cultural Change*, 50(4), 915–934. <https://doi.org/10.1086/342760>
- Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 9(2), 107–124. <https://doi.org/10.33830/jom.v9i2.41.2013>
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150–1182. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15041/12607>
- Mehmood, R., & Sadiq, S. (2010). Impact of Fiskal Decentralisation on Human Development: A

Case Study of Pakistan. *The Pakistan Development Review*, 49(4), 513–530. <http://www.thepdr.pk/pdr/index.php/pdr/article/view/2416>

Soejoto, A., & Subroto, W. T. (2015). Fiskal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financia*, 5(3), 763–771. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1314>

Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 30–42. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4345>

UNDP. (2019). *Human Development Report 2019*. UNDP. <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2019>

Woller, G. M., & Phillips, K. (1998). Fiskal Decentralisation and IDC Economic Growth: An Empirical Investigation. *Journal of Development Studies*, 34(4), 139–148. <https://doi.org/10.1080/00220389808422532>

Zhang, T., & Zou, H. (2001). The Growth Impact of Intersectoral and Intergovernmental Allocation of Public Expenditure. *China Economic Review*, 12(1), 58–81. [https://doi.org/10.1016/S1043-951X\(01\)00043-8](https://doi.org/10.1016/S1043-951X(01)00043-8)